



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 53) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 78

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berkewajiban memiliki Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu dan mengingat :

- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56) yang memiliki substansi prioritas pembangunan, rencana kerja, pendanaan indikatif baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Secara substansi, merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 -2024 dan merupakan penjabaran tahun terakhir dari Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024;
  - Berpedoman pada Rencana Kerja Provinsi dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
  - Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula Program dan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan ringkasan tentang Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah .

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

### **BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II (sampai dengan Bulan Juni 2023). Untuk detail capaian masing-masing indikator sampai dengan triwulan II, dapat dilihat sebagai berikut :

#### Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode 2024	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	Realisasi 2023 (sampai dengan triwulan II)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,75 poin	62,31 poin	Lingkungan Hidup	DLH	68,37 poin

Sumber : Bidang P2KL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Juni 2023

Berdasarkan data laporan capaian tingkat pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tahun 2023 sampai dengan triwulan II, diketahui bahwa sampah yang ditangani dan dapat diangkut ke TPA adalah sebanyak 233,50 ton/hari dari timbulan sampah untuk Kabupaten Garut adalah sebesar 1.121,823 ton/hari atau sebesar 20,81% . Sementara untuk pengurangan sampah sebesar 10,64% dari timbulan sampah Kabupaten Garut, sehingga pengurangan sampah sebesar 119,34 ton/hari. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengelolaan yaitu

dari data sampah yang dapat diangkut ke TPA (penanganan sampah) dan pengurangan sampah adalah sebanyak 352,84 ton/hari atau sebesar 31,45%.

Untuk memperoleh tingkat pengelolaan sampah, maka diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan tersebut, maka didapatkan tingkat pengelolaan sampah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 352,84 \text{ ton/hari} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 1.121,823 \text{ ton/hari} \\ & = 31,45\% \end{aligned}$$

Dalam hal pengelolaan sampah ini, Kabupaten Garut baru memiliki 1(satu) TPA yang beroperasi yaitu TPA Pasirbajing yang berada di Kecamatan Banyuresmi.

Pencapaian kinerja pelayanan dengan target dan realisasi capaian tahun 2022 dan 2023 sampai dengan triwulan II serta proyeksi tahun 2023 dan 2024 disajikan sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2023	tahun 2024	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup			56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin	70,75 poin	68,37 poin	60,75 poin	62,31 poin	Sudah melebihi target
2	Tingkat Pengelolaan Sampah			25%	25%	35%	45%	55%	29,95%	31,45%	45%	55%	Belum memenuhi target, baru 69,89%

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan lingkungan hidup adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan );
- Tingkat pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut termasuk ke dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah sebagai berikut ;

#### 1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Jumlah timbulan sampah semakin meningkat, yang disebabkan oleh :
  - Pertambahan jumlah penduduk;
  - Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat;
  - Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat.
- b) Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding dengan pertambahan jumlah sarana angkutan sampah;
- c) Permasalahan di TPA Pasirbajing yang terjadi pada saat hujan yaitu banjir sampah ke jalan dan pada musim kemarau terdapat kebakaran sampah.

#### 2. Upaya Pemecahan

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain:

- a) Pada tahun 2023, upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pengelolaan persampahan, diantaranya :
  - Pembangunan TPS 3R;
  - Pengadaan mesin pengolah sampah.
- b) Kegiatan penataan TPA antara lain pembuatan bangunan leacheat, pembangunan jalan;
- c) Pengadaan truck sebanyak 4 unit;
- d) Perencanaan lingkungan hidup (KLHS untuk tata ruang, RPPLH);

- e) Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.;
- f) Pemantauan kualitas lingkungan (pemantauan kualitas air, udara, dan inventarisasi GRK).

Di dalam Jakstrada disebutkan bahwa target pengelolaan sampah itu mencapai penanganan sebesar 70% dan pengurangan sebesar 30%. Apabila formulasi itu disimulasikan kepada target pencapaian 45%, maka penanganan harus mencapai 30% dan pengurangan 15%. Kedua komponen tersebut tidak tercapai karena penanganan yang dilakukan belum bisa menjangkau wilayah di luar wilayah pelayanan sekarang yaitu sebanyak 13 kecamatan. Salah satunya dikarenakan pelayanan pengangkutan dikonsentrasikan terlebih dahulu di wilayah perkotaan, mengingat jumlah dan kondisi armada angkutan juga yang belum bisa menjangkau wilayah yang lebih jauh.

Dinas Lingkungan Hidup sedang mengembangkan upaya-upaya dalam pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk forum komunikasi dengan para komunitas pegiat lingkungan termasuk didalamnya para pelaku Bank Sampah, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pengurus TPS 3R, melakukan edukasi lingkungan (cara mengolah sampah melalui budidaya maggot, kompos, eco enzyme, dsb), membentuk bank sampah induk, dan program kang raling (kampung ramah lingkungan).

Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023 untuk Dinas Lingkungan Hidup pada sisi akuntabilitas keuangan, pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan melalui APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1****Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tahun Berjalan)****Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>57.82%</b>	<b>20,300,152,648</b>	<b>10,908,904,521</b>	<b>53.74</b>
2.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>93,257,600</b>	<b>21,986,300</b>	<b>23.58</b>
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	1 dokumen	20,356,600	12,070,700	59.30
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5 laporan	3 laporan	21,901,000	9,915,600	45.27

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	% REALISASI KINERJA S.D. TW II	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. TW II	% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD					
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 berkas	51,000,000	-	0.00
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>18,063,236,232</b>	<b>9,978,644,233</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	263 orang	263 orang	18,052,399,432	9,975,266,433	55.26
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	10,836,800	3,377,800	31.17
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>187,407,685</b>	<b>45,750,000</b>	<b>24.41</b>
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyediaan tenaga jasa keamanan	5 orang	5 orang	187,407,685	45,750,000	24.41

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>232,404,381</b>	<b>134,222,300</b>	<b>57.75</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5,360,406	3,640,200	67.91
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	67,110,100	34,252,900	51.04
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	50,000,000	38,616,600	77.23
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	9,753,600	4,876,800	50.00
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	34,000,000	16,507,700	48.55

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	% REALISASI KINERJA S.D. TW II	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. TW II	% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	66,180,275	36,328,100	54.89
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1,252,260,000</b>	<b>448,563,800</b>	<b>35.82</b>
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	301,600,000	281,529,800	93.35
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang tersedia	4 unit	4 unit	50,660,000	49,380,000	97.47
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	900,000,000	117,654,000	13.07

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>252,266,750</b>	<b>76,367,188</b>	<b>30.27</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	72,360,000	31,929,688	44.13
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	179,906,750	44,437,500	24.70
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tersedia</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>219,320,000</b>	<b>203,370,700</b>	<b>92.73</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	17 unit	19,320,000	3,769,700	19.51

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	200,000,000	199,601,000	99.80
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>1,317,621,200</b>	<b>17,493,743</b>	<b>1.33</b>
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kajian akademis RPPLH yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>1 ( laporan awal RPPLH)</b>	<b>316,878,200</b>	<b>7,821,205</b>	<b>2.47</b>
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	1 ( laporan awal RPPLH)	316,878,200	7,821,205	2.47

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang yang disusun</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1 (Laporan awal KLHS RDTR)</b>	<b>1,000,743,000</b>	<b>9,672,538</b>	<b>0.97</b>
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	1 (Laporan awal KLHS RDTR)	1,000,743,000	9,672,538	0.97
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>60.75 poin</b>	<b>68.37 poin</b>	<b>982,075,000</b>	<b>582,068,020</b>	<b>59.27</b>
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen kajian kualitas air, tanah, dan udara</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>600,945,000</b>	<b>220,933,720</b>	<b>36.76</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan	1 dokumen	1 (laporan data hasil uji kualitas air dan udara)	393,520,000	61,304,720	15.58

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	% REALISASI KINERJA S.D. TW II	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. TW II	% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II
	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	laut					
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	107,425,000	104,779,000	97.54
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang disediakan	1 dokumen	1 ( data hasil uji parameter air permukaan)	100,000,000	54,850,000	54.85
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 ( Laporan kegiatan rehabilitasi)</b>	<b>381,130,000</b>	<b>361,134,300</b>	<b>94.75</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen	381,130,000	361,134,300	94.75
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (hutan kota)</b>	<b>0.144%</b>	<b>0.144%</b>	<b>1,518,900,000</b>	<b>878,105,292</b>	<b>57.81</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau</b>	<b>32 lokasi</b>	<b>32 lokasi</b>	<b>1,518,900,000</b>	<b>878,105,292</b>	<b>57.81</b>
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	10 ha	10 (laporan Dokumen Perencanaan KEHATI)	108,340,000	2,650,000	2.45
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.89 ha	7.89 ha	1,410,560,000	875,455,292	62.06

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3</b>	<b>100%</b>	<b>25.00%</b>	<b>31,350,000</b>	<b>3,580,000</b>	<b>11.42</b>
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan</b>	<b>1 dokumen</b>	1 (2 Laporan rincian teknis pengumpul an LB3)	<b>31,350,000</b>	<b>3,580,000</b>	<b>11.42</b>
2.11.05.2.02.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan	1 dokumen	1 ( Laporan rincian teknis pengumpul an LB3)	31,350,000	3,580,000	11.42
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 (laporan pendahulu an dan</b>	<b>380,000,000</b>	<b>109,583,754</b>	<b>28.84</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
	<b>LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>pengawasan</b>		<b>pengawas an)</b>			
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 (laporan pendahulu an dan pengawas an)</b>	<b>380,000,000</b>	<b>109,583,754</b>	<b>28.84</b>
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	2 rekomendasi	1 (laporan pendahulu an)	230,000,000	33,922,553	14.75

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	% REALISASI KINERJA S.D. TW II	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. TW II	% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	4 surat rekomendasi	1 surat rekomendasi	50,000,000	4,000,000	8.00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	50 dokumen	40 dokumen	100,000,000	71,661,201	71.66
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Jumlah status masyarakat hukum adat di Kabupaten Garut</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>33,715,500</b>	<b>1,120,000</b>	<b>3.32</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah lokasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang diakui</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>33,715,500</b>	<b>1,120,000</b>	<b>3.32</b>
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 (Data Laporan awal)	33,715,500	1,120,000	3.32
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan untuk Kecamatan</b>	<b>5 lokasi</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>88,000,000</b>	<b>25,215,800</b>	<b>28.65</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan</b>	<b>5 Lembaga/ Kelompok</b>	<b>2 Lembaga/ Kelompok</b>	<b>88,000,000</b>	<b>25,215,800</b>	<b>28.65</b>
2.11.08.2.01.02	Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Industri yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kopetensinya terkait PPLH	5 lembaga/ kelompok	2 lembaga/ kelompok	40,800,000	7,010,000	17.18
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 orang	40 orang	47,200,000	18,205,800	38.57
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kemitraan lingkungan</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>46,450,000</b>	<b>40,295,500</b>	<b>86.75</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Garut</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>46,450,000</b>	<b>40,295,500</b>	<b>86.75</b>
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	10 masyarakat/ lembaga	10 masyarakat/ lembaga	46,450,000	40,295,500	86.75
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>60.00%</b>	<b>64,068,500</b>	<b>36,578,312</b>	<b>57.09</b>

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>64,068,500</b>	<b>36,578,312</b>	<b>57.09</b>
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 laporan	1 laporan	64,068,500	36,578,312	57.09
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>45%</b>	<b>31.45%</b>	<b>31,382,925,403</b>	<b>10,275,417,892</b>	<b>32.74</b>
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>45%</b>	<b>31.45%</b>	<b>31,382,925,403</b>	<b>10,275,417,892</b>	<b>32.74</b>
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	1 laporan	3,239,724,403	812,116,200	25.07

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73,000 ton	36200 ton	13,676,442,200	2,172,103,250	15.88
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	10,616,707,700	6,060,318,442	57.08

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>% REALISASI KINERJA S.D. TW II</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>	<b>% REALISASI ANGGARAN S.D. TW II</b>
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	4 unit	4 unit	3,850,051,100	1,230,880,000	31.97
	<b>JUMLAH</b>				<b>56,145,258,251</b>	<b>22,878,362,834</b>	<b>40.75</b>

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (Tahun Berjalan)**

**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100	100	62,08	62,08	100	50	50,95
2.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	30 dokumen	15	8	4	50,00	8	17	56,67

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	3	2	1 dokumen	60,00	2	3	50
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 dokumen	10	5	3 laporan	70,00	5	13	65
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	2	1	1 berkas	10,00	1	2	50
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>57,08</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	263	263	263	263	60,00	263	263	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	4	2	1	1	50,00	1	2	50
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	2	1	1	50,00	1	2	50
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang tersedia</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>60,83</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	2	1	1	70,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	2	1	1	60,00	1	2	50
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Peggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	2	1	1	80,00	1	2	50
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	2	1	1	50,00	1	2	50
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	2	1	1	50,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	2	1	1	55,00	1	2	50
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>71,67</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12	9	9	9	100,00	9	9	75
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	8	4	4	100,00	4	4	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1	1	1	15,00	1	1	50
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	2	1	1	50,00	1	2	50
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	2	1	1	50,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>95,00</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19	19	19	17	90,00	19	19	50
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100,00	1	1	50
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>6,50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kajian akademis RPPLH yang disusun	8	4	2	1 ( laporan awal RPPLH)	10,00	2	4	50
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2	2	2	1 ( laporan awal RPPLH)	10,00	2	2	50
2.11.02.2.02	Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang yang disusun	21	12	3	1 (Laporan awal KLHS RDTR	3,00	3	12	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	21	12	3	1 (Laporan awal KLHS RDTR	3,00	3	12	50
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>62,31</b>	<b>60,75</b>	<b>60,75</b>	<b>68,37</b>	<b>107,57</b>	<b>60,75</b>	<b>65,35</b>	<b>104,9</b>
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen kajian kualitas air, tanah, dan udara</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>86,67</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4	2	1	1 ( laporan data hasil uji kualitas air dan udara)	100,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Laut									
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	4	2	1	1	100,00	1	2	50
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang disediakan	4	2	1	1 ( data hasil uji parameter air permukaan)	60,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 ( Laporan kegiatan rehabilitasi)</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>75</b>
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4	2	1	1	100,00	1	3	75
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (hutan kota)</b>	<b>0,166</b>	<b>0,146</b>	<b>0,156</b>	<b>0,156</b>	<b>50,00</b>	<b>0,156</b>	<b>0,156</b>	<b>50</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>40,00</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>50</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	10	10	10	1 (laporan Dokumen Perencanaan KEHATI)	50,00	10	10	50
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,39	7,39	7,89	7,89	65,00	7,89	7,89	50
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	1 (2 Laporan rincian teknis pengumpulan LB3)	25,00	<b>1</b>	2	<b>50</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.05.2.02.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan	4	2	1	1 (2 Laporan rincian teknis pengumpulan LB3)	25,00	1	2	50
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2 (laporan pendahuluan dan pengawasan)</b>	<b>26,67</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>53,84</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2 (laporan pendahuluan dan pengawasan)</b>	<b>40,00</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>53,84</b>
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	6	4	1	1 (laporan pendahuluan)	15,00	1	4	66,67
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	16	8	4	4	25,00	4	8	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	4	2	1	1	80,00	1	2	50
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Jumlah status masyarakat hukum adat di Kabupaten Garut</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah lokasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang diakui</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2	1	1	1 (Data Laporan awal)	10,00	1	1	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan untuk Kecamatan</b>	100	25	25	25	40,00	25	50	50
2.11.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan</b>	20	5	5	5	40,00	5	10	50
2.11.08.2.01.02	Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Industri yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kopetensinya terkait PPLH	20	5	5	5	40,00	5	10	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200	100	50	50	40,00	50	100	50
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kemitraan lingkungan</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Garut	4	2	1	1	100,00	1	3	70

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fllantropi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	100	40	30	30	100,00	30	70	70
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>60,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4	2	1	1 laporan	60,00	1	2	50
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>31,45</b>	<b>69,89</b>	<b>45</b>	<b>31,45</b>	<b>57,18</b>
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>31,45</b>	<b>69,89</b>	<b>45</b>	<b>31,45</b>	<b>57,18</b>
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4	2	1	1	50,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	91.250	73.000	73.000	36200	49,59	73.000	46250	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengeloaan sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	4	2	1	1	60,00	1	2	50

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024	
					Target Renja DLH Tahun 2023	Realisasi Renja DLH Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	16	8	4	4	100,00	4	8	50

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Garut, dalam menetapkan Visinya selain berpegang pada isu strategis lingkungan hidup, juga harus mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Tujuan dari misi jangka panjang Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam RPJPD 2005 – 2025 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan adalah "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Daya Fungsi Ruang". Sedangkan tujuan dari visi Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD 2019 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah "Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan".

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah yaitu "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup".

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin
			Tingkat Pengelolaan Sampah	25%	25%	35%	45%	55%

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,75 poin
		Tingkat Pengelolaan Sampah	45%

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan pelaksanaan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023. Program dan Kegiatan indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 merupakan pelaksanaan secara konkrit dari Strategi dan Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci rumusan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 dituangkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**

**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Lokasi</b>
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>18,855,256,993</b>	<b>21,239,807,656</b>	
<b>2.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>101,000,000</b>	<b>93,257,600</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	25,000,000	20,356,600	Tarogong Kidul
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	25,000,000	21,901,000	Tarogong Kidul
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	51,000,000	51,000,000	Tarogong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>16,590,298,349</b>	<b>18,965,729,240</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	263 orang	16,565,298,349	18,954,892,440	Tarogong Kidul
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 dokjumen	25,000,000	10,836,800	Tarogong Kidul
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>187,407,685</b>	<b>187,407,685</b>	
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyediaan tenaga jasa keamanan	5 orang	187,407,685	187,407,685	Tarogong Kidul
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>252,704,209</b>	<b>232,404,381</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,360,406	5,360,406	Tarogong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	67,110,100	67,110,100	Tarogong Kidul
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	50,000,000	50,000,000	Tarogong Kidul
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9,753,600	9,753,600	Tarogong Kidul
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	40,000,000	34,000,000	Tarogong Kidul
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	80,480,103	66,180,275	Kabutapen Garut, Luar Kabupaten Garut
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1,252,260,000</b>	<b>1,289,422,000</b>	
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	301,600,000	301,600,000	Tarogong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang tersedia	4 unit	50,660,000	77,822,000	Tarogong Kidul
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	900,000,000	910,000,000	Tarogong Kidul
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>252,266,750</b>	<b>252,266,750</b>	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	72,360,000	72,360,000	Tarogong Kidul
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	179,906,750	179,906,750	Tarogong Kidul
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tersedia</b>	<b>2</b>	<b>219,320,000</b>	<b>219,320,000</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	19,320,000	19,320,000	Tarogong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
	Dinas Jabatan					
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	200,000,000	200,000,000	Tarogong Kidul
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,370,000,000</b>	<b>1,487,621,200</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kajian akademis RPPLH yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>320,000,000</b>	<b>316,878,200</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	320,000,000	316,878,200	Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang yang disusun</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>1,170,743,000</b>	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	1,050,000,000	1,000,743,000	Kabupaten Garut
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		170,000,000	Kabupaten Garut
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>60.75 poin</b>	<b>997,435,000</b>	<b>1,234,505,000</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen kajian kualitas air, tanah, dan udara</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>609,635,000</b>	<b>650,945,000</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan	1 dokumen	400,000,000	393,520,000	Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	laut				
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	109,635,000	157,425,000	Kabupaten Garut
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang disediakan	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Garut
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>387,800,000</b>	<b>583,560,000</b>	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen		102,430,000	Garut Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	387,800,000	481,130,000	Pakenjeng, Cikajang, Cilawu, Karangtengah, Bayongbong, Cisurupan, Banjarwangi
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (hutan kota)</b>	<b>0.144%</b>	<b>1,527,000,000</b>	<b>1,518,900,000</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau</b>	<b>32 lokasi</b>	<b>1,527,000,000</b>	<b>1,518,900,000</b>	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	10 ha	110,000,000	108,340,000	Garut Kota
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.89 ha	1,417,000,000	1,410,560,000	Garut Kota, Banyuresmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karangpawitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>31,350,000</b>	
2.11.05.2.02	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>35,000,000</b>	<b>31,350,000</b>	
2.11.05.2.02.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan	1 dokumen	35,000,000	31,350,000	Kabupaten Garut
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	2 dokumen	230,000,000	230,000,000	Kabupaten Garut
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	4 peserta	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Garut
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	40 dokumen	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Jumlah status masyarakat hukum adat di Kabupaten Garut</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>45,000,000</b>	<b>33,715,500</b>	
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah lokasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang diakui</b>	<b>2 lokasi</b>	<b>45,000,000</b>	<b>33,715,500</b>	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan	1 dokumen	45,000,000	33,715,500	Leles, Cikelet

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
	dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan untuk Kecamatan</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>95,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan</b>	<b>5 lokasi</b>	<b>95,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	
2.11.08.2.01.02	Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Industri yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kopetensinya terkait PPLH	5 lembaga/ kelompok	45,000,000	40,800,000	Tarogong Kidul, Garut Kota, Karangpawitan, Banyuresmi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 orang	50,000,000	47,200,000	Tarogong Kidul, Garut Kota, Karangpawitan, Banyuresmi
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kemitraan lingkungan</b>	<b>"20%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>98,450,000</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Garut</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>98,450,000</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	10 lembaga/ masyarakat	50,000,000	98,450,000	Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>67,565,000</b>	<b>114,068,500</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>67,565,000</b>	<b>114,068,500</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 dokumen	67,565,000	64,068,500	Kabupaten Garut
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen		50,000,000	Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>45%</b>	<b>20,100,384,000</b>	<b>32,192,225,403</b>	
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	<b>45%</b>	<b>20,100,384,000</b>	<b>32,192,225,403</b>	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	1,979,770,000	3,370,724,403	Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Talegong, Selaawi, Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota, Banyuresmi, Pameungpeuk, Cibalong, Cisurupan, Samarang, Limbangan
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73000 ton	3,653,855,200	13,826,442,200	Banyuresmi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi
	Kabupaten/Kota					
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	10,616,707,700	11,061,707,700	Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Karangpawitan, Banyuresmi, Cilawu, Wanaraja, Sucinaraja, Pangatikan, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Cigedug
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	4 unit	3,850,051,100	3,933,351,100	Malangbong, Leles, Perkotaan Garut
	<b>JUMLAH</b>			<b>43,522,640,993</b>	<b>58,418,643,259</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan dalam Renja sebelumnya. Perubahan Renja yang disepakati menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2023 sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, ditunjang oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Substansi dan prioritas pembangunan daerah dalam urusan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Arah kebijakan pemerintah dalam RKP Tahun 2023;
- Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, dan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023;
- Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 diharapkan dapat terwujudnya perencanaan yang berkualitas dan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula Program dan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN